

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA
DI INDONESIA**

(Skripsi)

DENI AGUSTIAWAN



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRACT

THE EFFECT OF RESULT OF AUDIT BPK TO FINANCIAL GOVERNMENT PERFORMANCE IN INDONESIA

By

Deni Agustiawan

This study aims to analyze the effect of BPK audit results on the financial performance of local governments District / City in Indonesia. The type of research used in this study is a qualitative research with secondary data. The research sample is 398 districts / cities for the year 2014-2015. Analysis of data used in this research is to test the classical assumption and hypothesis testing with multiple linear regression method.

The results of this study show that audit opinion does not affect the performance of regional finances based on efficiency and effectiveness ratio and audit findings do not affect the financial performance of local governments based on the ratio of moderate efficiency audit findings negatively affect the financial performance of local governments based on the ratio of effectiveness.

Keywords: Audit opinion, audit findings, financial performance of local government.

ABSTRAK

PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA DI INDONESIA

Oleh:

Deni Agustiawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh hasil pemeriksaan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data sekunder. Sampel penelitian adalah 398 Kabupaten/Kota untuk tahun 2014-2015. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efisiensi dan efektivitas dan temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi sedang temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas.

Kata kunci: Opini audit, temuan audit, kinerja keuangan pemerintah daerah.

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA
DI INDONESIA**

Oleh

DENI AGUSTIAWAN

Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN
AUDIT BPK TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTA DI INDONESIA**

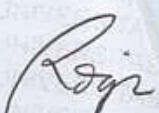
Nama Mahasiswa : **Deni Agustawan**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1341031008

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis




Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19750620 200012 2 001


Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19830830 200604 2 001

2. Ketua Jurusan Akuntansi



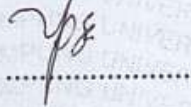
Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19620612 199010 2 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt.** 

Sekretaris : **Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.** 

Penguji Utama : **Yullansyah, S.E., M.SA., Ph.D., Akt.** 

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **18 Januari 2018**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deni Agustiawan

NPM : 1341031008

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia” telah ditulis secara sungguh-sungguh dan merupakan hasil karya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutipan atas karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018

Penulis



Deni Agustiawan
NPM. 1341031008

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Langsa, Aceh, tanggal 16 Juli 1995 sebagai putra ketiga dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Sugio dan Usmi Dewi.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Sukarejo, Langsa, Aceh lulus tahun 2007. Pendidikan menengah pertama di MTSN Negeri 16 Langsa, Aceh tahun 2010, dan sekolah menengah atas di SMAN 2 Langsa tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung pada tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa, penulis terdaftar sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila. Selain itu, penulis juga menjadi anggota UKMF ROIS FEB Unila.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah.”

(HR. Turmudzi)

“Jika kamu bersungguh- sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri”

(QS.AL-ANKABUT :6)

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.”

(QS.AL-Baqarah: 45)

”Lebih baik mencoba walaupun gagal, dari pada tidak ingin mencoba sama sekali”

(Deni Agustiawan)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ☞ Kedua orang tua yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepadaku.
Ayahku Sugio dan Ibuku Usmi Dewi yang selalu mendoakan, memberikan nasihat dan pengorbanan yang diberikan kepadaku.
- ☞ Kakakku Dona Ramadhan dan seluruh keluarga besarku untuk semangat, doa, dan nasihat yang diberikan.
- ☞ Seluruh sahabat, teman-temanku dan seluruh keluarga besar HIMACIKEP.
- ☞ Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesias” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Yenni Agustina, S.E., M.Si.,Akt selaku Dosen Pembimbing Kedua atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi.
5. Bapak Yuliansyah S.E., M.SA., Ph.D., Akt selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.
8. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, Mbak Tina, Mpok, Mas Veri, Mas Yana, Mas Yogi, Mas Leman, Mas Ruli, Mbak Diah, atas bantuan dan pelayanannya selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
9. Kedua orang tua, Bapak (Sugio) dan Ibu (Usmi Dewi) yang telah memberikan kasih sayang nasihat, arahan, dukungan, dan tiada hentinya selalu mendoakan demi keberhasilan dan kesuksesanku.
10. *My Brother*, Dona Ramadhan, Dinaya Masyaputra dan mbak ipar Indah,S.E yang telah memberikan , dukungan, doa, nasihat, , motivasi, selalu dan selalu sabar mendampingi.
11. Adik tersayang Devi Lutviani yang selalu memberikan dukungan

12. Keluarga HIMACIKEP dan bagian juga dari kontrakan, Anjas, Sidik, Adon, Sulton, Iqbal, Abdul, Ardi, Arbud, Sunu, Sesil, Audhitya, Ferdinan, Lano, terimakasih atas dukungan, keceriaan, canda, tawa, dan pengalaman hidup yang penuh warna selama ini. *See you on top, guys!* Tetap jalin silaturahmi ya. Teruslah berkarya karna dunia seperti itu tidak ada matinya kecuali kiamat.
13. Ana Mei Rafika terima kasih atas semangat, dukungan, keceriaan, canda, tawa, selama proses penyelesaian skripsi ini yang telah memberikan masukan, bantuan dan saran.
14. Rekan-rekan Akuntansi Paralel 2013, Tipeh, Ratu, Diska, Vectry, Adit, Kinan, Syuhada, Meli, Novi, Diena, Dewi, Laviona, Ayudia, Fitria, Nadaa, Gus, Jania, Siti Makhluفا, Reni dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua sukses, amin
15. Novi Windasari terima kasih atas berkontribusinya dalam pembuatan skripsi, telah membantu mengajarkan aplikasi SPSS, mengolah data SPSS.
16. Keluarga KKN Desa Sinar Jawa, Mahardika, Sakha Abdussalam, Ahlul Ryntan Tiara, Semiyati dan mabk Ria terima kasih atas pengalaman hidup selama 2 bulan dan dukungan yang telah diberikan.
17. Rekan- rekan kontrakan, Komang Reka, Ketut Destian, Galih, Rico dan Syaril Sidik, Iqbal Susendi terima kasih atas kebersamaannya selama 3 tahun ini untuk suka maupun dukanya, Tetep selalu jaga kekompakan.
18. Seluruh teman, kerabat, dan pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu selama proses penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Bandar Lampung, 19 Januari 2018
Penulis,

Deni Agustiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4

1.3	Tujuan Penelitian.....	4
1.4	Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Kajian Teori.....	6
2.1.1	Teori Keagenan.....	6
2.2	Temuan Audit.....	9
2.3	Opini Audit.....	10
2.4	Kinerja Pemerintah Daerah	13
2.5	Peneliti Terdahulu	14
2.6	Kerangka Pemikiran	16
2.7	Pengembangan Hipotesis	17
2.7.1	Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas).....	17
2.7.2	Pengaruh Temuan Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Efisiensi dan Efektivitas).....	18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Populasi dan Sampel	20
3.2	Jenis dan Sumber Data	21
3.3	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	21
3.3.1	Variabel Dependen	21
3.3.1.1	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
3.3.2	Variabel Independen	23
3.3.2.1	Temuan Audit BPK	23
3.3.2.2	Opini Audit BPK	24
3.4	Metode Analisis Data	24
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif	24
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	25
3.4.2.1	Uji Normalitas	25
3.4.2.2	Uji Multikolinieritas	26

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas	26
3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda	27
3.5 Pengujian Hipotesis	28
3.5.1 Analisis Koefisiensi Determinasi	28
3.5.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)	29
3.5.3 Uji Singnifikasi Parameter Individual (Uji Statistik t)	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif	31
4.2 Uji Asumsi Klasik	34
4.2.1 Uji Asumsi Klasik (Efisiensi)	34
a. Uji Normalitas	34
b. Hasil Uji Multikolinieritas	37
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	39
4.2.2 Asumsi Klasik (Efektivitas)	40
a. Uji Normalitas	40
b. Hasil Uji Multikolinieritas	43
c. Hasil Uji Heteroskedastisitas	45
4.3 Uji Hipotesis	46
4.3.1 Uji Hipotesis (Efisiensi).....	46
a. Uji Koefisien Determinan.....	46
b. Uji Statistik F	47
c. Uji t-statistik	48
4.3.2 Uji Hipotesis (Efektivitas).....	50
a. Uji Koefisien Determinan.....	50
b. Uji Statistik F	51
c. Uji t-statistik	52
4.4 Pembahasan dan Hasil Analisis	55
4.4.1 Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	55
4.4.2 Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan.....	62
5.2	Keterbatasan Penelitian	63
5.3	Implikasi dan Saran Penelitian.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman	
4.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	31
4.2	Hasil Uji Normatif Model Pertama Sebelum Transformasi dan Outlier	35
4.3	Hasil Uji Normatif Model Pertama Setelah Transformasi dan Outlier	36
4.4	Uji Multikolinearitas Model Pertama.....	38
4.5	Uji Heteroskedastisitas Model Pertama	39
4.6	Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier Model Kedua	41
4.7	Hasil Uji Normalitas Setelah Outlier Model Kedua	42
4.8	Hasil Uji Multikolinieritas Model Kedua	44
4.9	Uji Heteroskedastisitas Model Kedua.....	45
4.10	Pengujian Koefisien Determinan Model Pertama.....	47
4.11	Uji Statistik F Model Pertama.....	48
4.12	Hasil Pengujian t-statistik Model Pertama.....	49
4.13	Pengujian Koefisien Determinan Model Kedua	50
4.14	Uji Statistik F Model Kedua	51
4.15	Hasil Pengujian t-statistik Model Kedua	52
4.16	Hasil Penelitian Berdasarkan Rasio Efisiensi	54
4.17	Hasil Penelitian Berdasarkan Rasio Efektivitas	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Penelitian.....	16
4.1 Grafik Probability Plot Model Pertama.....	37
4.2 Grafik Probability Plot Model Kedua.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Sampel Pemerintah Daerah Di Indonesia

Lampiran 2 : Rekapitulasi Data Variabel Dependen dan Independen

Lampiran 3 : Hasil Olah Data SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah memberikan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Saragih dan Setyaningrum, 2015). Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diikuti reformasi keuangan dilakukan pada semua tahapan proses keuangan negara dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan dan audit (Juweny, 2016). Oleh karena itu untuk mendukung tata kelola pemerintah yang baik dalam melaksanakan otonomi daerah tersebut, Sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan undang-undang yang berlaku, efesiensi, efektif, transparan dan bertanggungjawab memerhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Dalam mengupayakan hal tersebut pemerintah daerah

diharuskan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu diperlukan pengukuran kinerja yang merupakan komponen penting yang dapat memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan dan untuk menilai akuntabilitas kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menghasilkan pelayanan publik. Kinerja keuangan daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan dan tata kekelola keuangan pemerintah yang baik.

Kinerja keuangan daerah di Indonesia sering menimbulkan pelanggaran hukum, hal tersebut yang menjadi masalah serius dan harus segera dibenahi agar kedepannya dalam upaya menjalankan program-program kemakmuran rakyat berjalan secara optimal. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena pejabat yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, belum optimal dalam melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset, serta belum tepat menerapkan kebijakan jaminan reklamasi (BPK, 2015).

Permasalahan lain terdapat didalam laporan tahunan BPK ditemukan kasus permasalahan ketidakpatuhan terhadap undang-undang, pada pemeriksaan semester I 2015, hasil pemeriksaan atas 504 LKPD mengungkapkan 7.888 temuan yang memuat 5.978 permasalahan SPI. Kemudian pada semester II 2015 atas 35 LKPD menunjukkan adanya 613 temuan yang didalamnya terdapat 474 permasalahan SPI. Secara umum, permasalahan kelemahan SPI tersebut banyak ditemukan dalam pengelolaan akun pendapatan dan belanja. Permasalahan

tersebut karena para pejabat/ pelaksana yang bertanggungjawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan (BPK, 2015). Hal tersebut belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksi masing-masing, belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan, dan kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, serta adanya kelemahan pada sistem aplikasi yang digunakan (BPK, 2015). Dengan permasalahan tersebut menggambarkan bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

Untuk lebih lanjut perlunya dilakukan pemeriksaan keuangan yang lebih lanjut, untuk di Indonesia sendiri pemeriksaan keuangan dilakukan oleh Badan pemeriksaan keuangan (BPK) yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah opini audit, temuan audit dan rekomendasi. Opini audit yang diberikan oleh BPK diantaranya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Dalam penelitian ini variabel yang akan di uji temuan audit dan opini audit. Penelitian ini menggunakan pengujian data tahun 2014-2015 dengan harapan mampu memberi informasi yang lebih relevan.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia”**. Menurut peneliti, topik ini sangat menarik untuk diteliti, karena beberapa hal yaitu pertama,

terjadinya ketidak konsistenan hasil dari peneliti-peneliti sebelumnya yaitu seperti penelitian yang dilakukan Renas (2014), Masdiantini dan Erawati (2016), Afrian (2016), Sudarsana dan Rahardjo (2013) dan Sesotyaningtyas (2012). Yang kedua, penelitian sebelumnya yang terbaru setelah penelitian yang dilakukan hanya meneliti ruang lebih sempit, seperti hanya tingkat Provinsi saja. Ketiga, peneliti ingin mengetahui perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah dengan cakupan objek penelitian dan periode penelitian yang lebih luas berdasarkan saran yang di kemukakan oleh peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti antaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia?
2. Apakah temuan audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan peneliian ini adalah Untuk memperoleh bukti dari pengaruh temuan audit dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat dari berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai peneruh temuan audit BPK dan opini audit BPK terhadap kinerja Keuangan pemerintah daerah. Untuk peneliti lainnya dapat dijadikan sebagai bahan referensi, data tambahan dan pembandingan pada kajian bidang ini.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan hak bagi setiap masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah. Serta dapat menumbuhkan kesadaran terhadap masyarakat untuk melakukan pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Bagi pemerintah

Diharapkan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Khususnya dikaitkan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang baik diharapkan akan berdampak pada pencapaian kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan ini menjelaskan hubungan mengenai pengaruh temuan audit BPK dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jesen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai berikut

“agency relationship as a contract under which one or more person (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent”.

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada *agen* membuat keputusan yang terbaik bagi *prinsipal*. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agen* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Berdasarkan teori keagenan, menggambarkan bagaimana hubungan masyarakat dengan pemerintah, dimana hubungan tersebut timbul dikarenakan adanya kontrak yang

ditetapkan oleh masyarakat (sebagai *prinsipal*) untuk pemerintah (sebagai *agen*) yang menyediakan jasa untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat akan mengawasi tujuan pemerintah, dalam melakukan pengawasan tersebut masyarakat mewajibkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepada pemerintah melalui laporan keuangan. Sudarsana dan Rahardjo (2013) adanya pemisahan kepemilikan oleh *principal* dengan pengendalian oleh *agen* dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara *agen* dan *prinsipal*. Dalam hal ini *agen* secara moral bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan *principal*, namun disisi lain manajemen juga berkepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Pemerintah akan lebih banyak memperoleh informasi mengenai sumber daya yang dimiliki daerah baik dalam bentuk APBN/APBD dibandingkan masyarakat, hal ini disebut sebagai asimetri informasi, sehingga cenderung menimbulkan masalah *agency*. Yusrianti dan safitri (2015) di kutip dalam Akbar dan Pilcher (2012) menyatakan bahwa dengan menunjukkan hasil kinerja dalam bentuk LAKIP, maka *agency problem* yang mungkin terjadi dapat dikurangi, karena masyarakat sebagai *principal* dapat melihat dan mengukur hasil kinerja Pemda. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah harus mengelola dan mengukur kinerja dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendapatkan dukungan masyarakat.

Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa serta mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh *prinsipal* atas

apa yang dilakukan oleh *agen*. Laporan keuangan dan pengungkapan informasi kepada publik adalah salah satu bentuk alat monitoring untuk mengurangi *agency cost* (Hendriyani dan Tahar, 2015).

Menurut Fadzil dan Nyoto (2011) hubungan keagenan menimbulkan asimetri informasi yang menimbulkan beberapa perilaku seperti *oportunistik*, *moral hazard*, dan *adverse selection*. Perilaku *oportunistik* dalam proses penganggaran contohnya, (1) anggaran memasukkan program yang berorientasi publik tetapi sebenarnya mengandung kepentingan pemerintah untuk membiayai kebutuhan jangka pendek mereka dan (2) alokasi program ke dalam anggaran yang membuat pemerintah lebih kuat dalam posisi politik terutama menjelang proses pemilihan, yaitu program yang menarik bagi pemilih dan publik dapat berpartisipasi di dalamnya. Menurut Sudarsono dan Rahardjo (2013) teori *agency* ini beranggapan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara pihak *agen* (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak *principal* (masyarakat). Adanya *information asymmetry* inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh *agen*. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi *information asymmetry* (Setiawan, 2012).

Berdasar teori keagenan (Agency Theory) pengelolaan pemerintah daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 (UU No.15/2004) Pemeriksaan adalah

proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah yang itu artinya *informatif asymmetry* yang terjadi dapat berkurang.

2.2 Temuan Audit BPK

Audit adalah proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ditetapkan (Pramono, 2008 dalam Afrian,2016). Keyakinan publik pada keandalan laporan keuangan yang dihasilkan secara internal bergantung secara langsung pada validasi oleh auditor ahli yang independen. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Berdasarkan UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK (dalam

Afrian,2016), rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Pelaporan
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.
3. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Bastian (2006) dalam Marfiana dan Kurniasih (2013), audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif. Afrian (2016) menyatakan bahwa Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut.

2.3 Opini Audit BPK

Opini audit adalah hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor atas audit laporan keuangan. Penjelasan pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Menurut Muflihatin (2016), standar pemeriksaan keuangan negara (2007, PSP 03

Standar Pelaporan Pemeriksaan Keuangan, paragraf 03) menyatakan bahwa laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan secara keseluruhan atau suatu asersi pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor. Dalam hal ini auditor juga akan memberikan pendapat (opini) atas laporan keuangan yang telah di auditnya. Dalam IHPS BPK, tentang jenis opini terdapat 5 (lima) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)

menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas

Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjas. Kondisi atau keadaan yang memerlukan bahasa penjas tambahan antara sebagai berikut:

- a) Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain. Auditor harus menjelaskan hal ini dalam paragraf pengantar untuk menegaskan pemisahan tanggung jawab dalam pelaksanaan audit.
 - b) Adanya penyimpangan dari prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh profesi atau pihak yang berwenang. Penyimpangan tersebut adalah penyimpangan yang terpaksa agar tidak menyesatkan pemakai laporan keuangan hasil audit. Auditor harus menjelaskan penyimpangan yang dilakukan berikut estimasi terhadap pengaruh serta alasan dilakukannya penyimpangan ini dalam satu paragraf khusus.
 - c) Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian yang material.
 - d) Auditor meragukan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya .
 - e) Auditor menemukan adanya suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip dan metode akuntansi.
3. Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)

menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)

menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, jika bukti audit tidak untuk membuat kesimpulan.

2.4 Kinerja Pemerintah Daerah

Masdiantini dan Erawati (2016) dalam kutipan Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat dianalisis dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Melakukan analisis rasio keuangan pada APBD berarti membandingkan hasil yang telah dicapai pada satu periode dengan periode sebelumnya sehingga kecenderungan yang terjadi dapat diketahui. Pengukuran kinerja dapat diukur dengan value for money yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan menurut (Kusumawardani, 2012) dalam kutipan (Mardiasmo, 2009:4) pengukuran kinerja dapat diukur dengan enam rasio yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, rasio pertumbuhan.

Gamayuni (2015) pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan dengan melalui konsep *value for money* yaitu terdiri dari tiga indikator:

ekonomi, efisien dan efektivitas. Dalam aspek perencanaan, informasi tentang kinerja memberikan gambaran penting dan fundamental tentang kondisi saat ini yang menjadi basis perencanaan. Informasi kinerja juga dibutuhkan pada saat pelaksanaan kegiatan. Informasi tentang kinerja dalam bentuk laporan pertanggungjawaban menjadi informasi yang paling krusial untuk kepentingan evaluasi. Tanpa laporan kinerja dalam proses pertanggungjawaban, siklus penganggaran berbasis kinerja menjadi tidak lengkap. Anggaran kinerja merencanakan uang dan kinerja. Karena itu, penggunaan uang dan pencapaian kinerja yang bersangkutan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode penganggaran. Untuk mendorong proses pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja secara sistematis, pemerintah mempunyai sebuah pedoman penyusunan laporan kinerja yang disebut laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu laporan harus disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait temuan audit BPK dan opini audit BPK dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012), Sudarsana dan Rahardjo (2013), Renas (2014), Afrian (2016) dan Masdiantini dan Erawati (2016). Penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasaki (2012) membuktikan bahwa temuan audit memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota untuk dengan menggunakan beberapa metode regresi untuk 275 PEMDA untuk tahun 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai

dengan hipotesis. temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemda.

Pada penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013) untuk membuktikan bahwa temuan Audit BPK berpengaruh terhadap skor kinerja pemerintah daerah kabupaen/kota. Penelitiannya dilakukan disemua pemerintahan daerah kabupaten/kota di Indonesia untuk tahun anggaran 2010. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Pada penelitian Renas (2014) penelitiannya membuktikan temuan audit BPK tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. penelitiannya dilakukan di pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi jawa tengah untuk tahun anggaran 2009-2011. Hasil penelitiannya menunjukkan sesuai hasil koefisien regresi sebesar -0,01328 menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif. Diperoleh nilai t sebesar 0,752 dengan signifikansi sebesar 0,454. ($t > 0,05$) dan menghasilkan keputusan terhadap H_0 diterima dan H_1 .

Afrian (2016) penelitiannya membuktikan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Sampel yang digunakan sebanyak 12 kabupaten/kota di provinsi Riau mulai dari tahun 2009-2013. Hasil dari penelitiannya membuktikan bahwa variabel dalam penelitiannya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Riau.

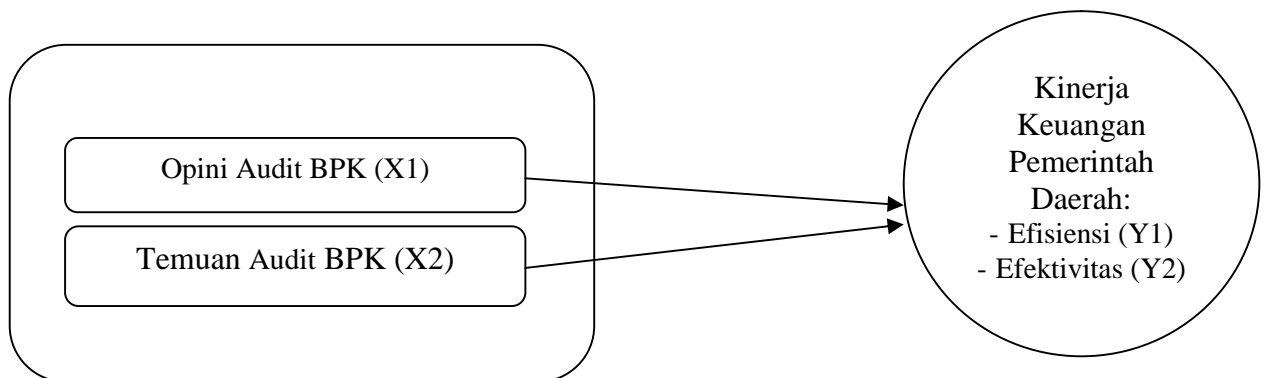
Masdiantini dan Erawati (2016) penelitiannya membuktikan temuan audit dan opini audit . penelitiannya dilakukan di pemerintah kabupaten/ kota se-Bali, data diperoleh dari data laporan keuangan pemerintah 8 kabupaten dan 1kota diprovinsi Bali dalam kurun waktu 6 tahun. Sampel yang digunakan sebanyak 54. Hasil penelitiannya menunjukkan temuan audit yang diproksikan dengan temuan kasus pelanggaran SPI tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah dan sedangkan untuk opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh temuan audit BPK dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran



2.7 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, dan kajian mengenai kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu, sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

2.7.1 Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas)

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini BPK dapat menjadi tolok ukur (indikator) untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah. Semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016). Opini ini dapat menaikkan ataupun menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas pemerintah daerah (Masdiantini dan Erawati, 2016). Semakin banyak opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan Opini, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemda (Sudarsana, 2013). Indrarti (2011) menyatakan dalam pemberian opini audit, BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal, pemeriksaan akun-akun, dan catatan akuntansi. Tujuan pemeriksaan tersebut berguna untuk mendeteksi ada tidaknya kecurangan (fraud)

dalam pencatatan apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dan bukan berdasarkan jumlah atau nominal dari data keuangan tersebut (Indrarti, 2011).

Dalam penelitian Masdiantini dan Erawati (2016) menyatakan bahwa adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Opini audit BPK RI berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah. maka hipotesis yang diajukan adalah

Hipotesis 1.1: Opini audit BPK Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Efisiensi).

Hipotesis 1.2: Opini audit BPK Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Efektivitas).

2.7.2 Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas)

Menurut Afrian (2016) Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan ini dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian negara/daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Adanya temuan ini

menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian yang menghubungkan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang menemukan hasil bahwa temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Peneliti lainnya juga dilakukan oleh Afrian (2016) menjelaskan bahwa temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) menjelaskan hasil penelitiannya yang menggunakan temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menyatakan bahwa semakin besar jumlah temuan audit BPK pada suatu pemerintah daerah maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah itu. Maka berdasarkan dari penjelasan penelitian tersebut, maka hipotesis yang diajukan peneliti adalah:

Hipotesis 2.1: Temuan Audit BPK berpengaruh Positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Efisiensi).

Hipotesis 2.2: Temuan Audit BPK berpengaruh Negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Efektivitas).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Maiyora, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun 2014 dan 2015 berjumlah 539 dan 542 pemerintah daerah. Sampel adalah sebagian dari populasi atau sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah *Cluster sampling*. Setiap daerah provinsi akan di ambil 6 sampel secara acak dari masing-masing 34 provinsi yang ada di Indonesia tahun 2014-2015. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 398 pemerintah daerah di Indonesia. sampel di peroleh dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2014-2015 untuk mendapatkan jumlah temuan audit dan opini audit baik yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberi Pendapat (TMP) ataupun Tidak Wajar (TW).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang didapat dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi yang berupa data yang akan diambil dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia berupa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan berupa temuan audit dan opini audit atas ketidakpatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan atas LKPD tahun anggaran 2014-2015 yang diperoleh dari ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2014-2015. Data yang dikumpulkan diperoleh dari website www.bpk.go.id.

3.3 Pengukuran dan Definisi Oprasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan dependen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

3.3.1 Variabel Dependen

3.3.1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Menurut Halim (2007:231) dalam Maiyora (2015) terdapat enam rasio yang dapat dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu

rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efesiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, rasio pertumbuhan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi dan efektivitas atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan alokasi yang dianggarkan oleh pemerintah daerah (Afrian, 2016). Rasio efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang di rencanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Suoth, *et al*, 2016) . Dalam penelitian ini, kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan rasio efisiensi dan efektivitas. Dengan kriteria presentase kinerja efisien sebagai berikut: 100% ke atas tidak efisien; 90% – 100% kurang efisien; 80% – 90% cukup efisien; 60% – 80% efisien; dan di bawah 60% sangat efisien (Suoth, *et al*, 2016). Sedangkan untuk rasio efektivitas dengan kriteria persentase sebagai berikut: dibawah 60% tidak efektif; 60% – 80% kurang efektif; 80% – 90% cukup efektif; 90% – 100% efektif dan 100% ke atas sangat efektif . Berdasarkan Retnowati (2016), Masdiantini (2016) dan Suoth, *et al* (2016) pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan rumus :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Output)}}{\text{Realisasi Penerimaan (Input)}}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini adalah temuan Audit BPK dan opini audit BPK.

3.3.2.1 Temuan Audit BPK

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mengungkapkan bahwa pada umumnya pengawasan atasan langsung masih lemah, sehingga masih ditemukan penyimpangan–penyimpangan dalam pelaksanaan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan atasan langsung dan adanya temuan audit di beberapa daerah. Dalam IHPS BPK, kasus kelemahan SPI terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern (Masdiantini dan Erawati, 2016). Rentang jumlah temuan kasus untuk menentukan klasifikasi banyak sedikitnya temuan audit dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan nilai rata-rata temuan kasus kelemahan SPI seluruh pemerintah daerah (Afrian, 2016).

3.3.2.2 Opini Audit BPK

Menurut Masdiantini dan Erawati (2016) pada dasarnya opini audit yang baik disektor privat maupun disektor publik dibedakan menjadi empat kategori yang diukur menggunakan skala ordinal yang diurutkan dari opini terburuk hingga opini terbaik yaitu (1) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), (2) Tidak Wajar (TW), (3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (4) Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP) dan (5) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun dalam penelitian ini pengukuran untuk opini audit dikelompokkan dalam empat kategori berdasarkan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yaitu TMP diberi skor 1, TW diberi skor 2(dua), WDP diberi skor 3 (tiga) dan WTP diberi skor 4 (empat).

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinan (R^2), uji statistik F, dan uji statistik T.

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari penghitungan mean, median, deviasi standar, maksimum, dan minimum dari masing-masing data sampel (Ghozali dan Ratmono, 2013). Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut (Ghozali dan Ratmono, 2013). Analisis ini akan memberi penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian yaitu Temuan Audit dan opini audit BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda terhadap data yang diperoleh dalam penelitian, maka terlebih dahulu harus dilakukan uji asumsi klasik untuk mendeteksi apakah data dalam penelitian ini menjadi penyimpangan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.4.2.1 Uji Normalitas

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sedangkan, uji statistik dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Nilai z statistik untuk skewness dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{skewness}}{\sqrt{6/N}}$$

Sedangkan nilai z kurtosis dapat dihitung dengan rumus :

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{Kurtosis}}{\sqrt{24/N}}$$

Dimana N adalah jumlah sampel, jika nilai Z hitung > Z tabel, maka distribusi tidak normal. Misalkan nilai Z hitung > 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikansi 0,01 dan pada tingkat signifikansi 0,05 nilai Z tabel = 1,96.

3.4.2.2 Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2013) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya nilai *variance inflation factor* (VIF).

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 (Ghozali, 2013).

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas diantaranya (Ghozali, 2013):

1. Melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*.

2. Uji Park, Park mengemukakan metode bahwa variance (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel independen.
3. Uji Glejser, Glejser mengusulkan untuk meregres nilai *absolut residual* terhadap variabel independen.
4. Uji White, White dapat dilakukan dengan meregres residual kuadrat (U^2_t) dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel independen

3.4.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan variabel independen yang sudah diketahui besarnya. Dalam penelitian ini, variabel independen yaitu temuan audit dan opini audit. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah (Rasio Efisiensi dan Efektivitas). Metode analisis data akan dilakukan dengan bantuan aplikasi *computer* program SPSS versi 22. Persamaan Linear Berganda sebagai berikut:

$$Y1 = a + b1X1 + b2X2 + e$$

$$Y2 = a + b1X1 + b2X2 + e$$

Keterangan :

- Y1 : Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efisiensi)
 Y2 : Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Rasio Efektivitas)
 a : Konstanta
 b : Koefisien Regresi
 X₁ : Opini Audit BPK
 X₂ : Temuan Audit BPK
 e : Standar error

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crossesction*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamat, sedangkan untuk data runtun waktu (*times series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinan yang tinggi (Ghozali, 2013). Data yang hanya terdiri dari satu sampai dua variabel bebas ada baiknya menggunakan R Square, tetapi apabila jumlah variabel bebas nya lebih dari dua maka lebih baik menggunakan *Adjusted R Square*.

3.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel depende/terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1=b_2=\dots\dots\dots=b_k=0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_A : b_1 \quad b_2 \quad \dots\dots\dots \quad b_k \quad 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) *Quick lock* : bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H_0 dapat ditolak dapa derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_A .

3.5.3 Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t)

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (β_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_0 : \beta_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t tersebut berikut:

- 1) *Quick Lock*: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $\beta_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel independen (Ghozali,2013).

Bab V

Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh temuan audit dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. data sampel sebanyak 398 pengamatan pemerintah daerah di Indonesia periode 2014- 2015. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah di Indonesia secara keseluruhan masih kurang baik, masih banyaknya kinerja keuangan pemerintah daerah yang kurang efisien dan efektif dalam menggunakan APBD untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus berupaya lebih baik dalam meningkatkan PAD dan merealisasikan belanja daerah.

Hasil pengujian dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diringkas sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah baik menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Marfina Kurniasih (2013). Tetapi, bertentangan dengan penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Suryaningsih dan Sisdyani (2016).
2. Hasil menunjukkan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi dan

berdasarkan rasio efektivitas temuan audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan rasio efisiensi hasil penelitian ini mendukung penelitian Masdiantini dan Erawati (2016), Renas (2014). Sedangkan berdasarkan rasio efektivitas hasil penelitian ini mendukung penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013), Afrian (2016).

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit dan temuan audit secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar 0,321. Sedangkan opini audit dan temuan audit secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas yang ditunjukkan dari nilai signifikan sebesar 0,038 dari uji F.

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dalam penelitian- penelitian selanjutnya.

Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan data tahun 2014 dan 2015, penggunaan tahun yang lebih baru dan lebih panjang dapat memberikan gambaran yang lebih terkini dari kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini menggunakan variabel opini audit BPK dan temuan audit BPK. Variabel tersebut hanya menjelaskan sebagian dari faktor- faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu hanya 0,8%

berdasarkan rasio efisiensi dan 2,4% berdasarkan rasio efektivitas, sisanya 99,2% dan 97,6% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

3. Penelitian ini tidak menjelaskan kriteria seberapa besar temuan audit dikatakan banyak dan temuan audit dikatakan sedikit, Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruhnya terhadap kinerja keuangan pemerintah tersebut.

5.3 Implikasi dan Saran

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa yang akan datang diharapkan mampu memberikan hasil penelitian yang lebih berkualitas, dengan mempertimbangkan saran dibawah ini :

1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan proksi variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, contohnya: ukuran daerah, tingkat ketergantungan, ukuran legislatif, pendapatan pajak, dana perimbangan, fungsi pengawasan DPRD, jumlah penduduk, jumlah pegawai dan lain-lain, dan menambahkan pengukuran kinerja dilihat dengan tingkat kemandirian atau jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan untuk mengambil tahun pengamatan yang lebih panjang lebih dari 2 tahun, sehingga dapat merealisasikan kondisi pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia dan diharapkan dapat menambahkan kriteria untuk menentukan besar kecilnya

temuan audit. Sehingga memperjelas pengaruh besar kecilnya temuan audit terhadap kinerja keuangan pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan cermat, sehingga tercapai tujuan dan sasaran program. Hal ini mengingat bahwa besarnya belanja pemerintah belum menjamin akan tercapainya tujuan program bila penyusunannya tidak dilakukan dengan baik. Bagi pemerintah pusat diharapkan agar mengutamakan dan memperhatikan ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam mengeluarkan anggaran untuk daerah, agar anggaran yang dikeluarkan dapat dikelola dengan baik.

Daftar Pustaka

- Afrian, Galang. 2016. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal. Jon FEKON Vol.3.No.1
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2015. “Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tentang Permasalahan Kerugian Daerah”. Potensi Kerugian Daerah. Hal 87.
- Fadzil, Hanim Faudziah., Nyoto Harryanto. 2011. Fiscal Decentralization After Implementation of Local Government Autonomy in Indonesia. World Review of Business Research (Vol. 1, No. 2; 51-70)
- Gamayuni, Rindu Rika. 2015. “Akuntansi Sektor Publik”. Bandar Lampung : AURA
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2013. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Edisi Pertama. Penerbit: UNDIP
- Hartajunika, Gerry.dkk. 2015. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Sektor Publik”. E-Jurnal. S1 Akuntansi Universitas pendidikan Genesha. Volume 3. Nomor 1.
- Hendriyani, Ririn dan Tahar, Afrizal. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Di Indonesia”. Jurnal Bisnis & Ekonomi (JBE). Vol.22. No.1. Hal. 25-33. ISSN : 1412-312625.
- Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2011. “Hubungan antara Opini Audit pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kinerja Keuangan Daerah”. Jurnal. Universitas Riau.
- Jensen and Meckling (1976) “Theory of Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure” Scribd.
- Juweny, Siti. 2016. “Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah”. Tesis Universitas Lampung.

- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 1. ISSN: 2252-6765
- Kurniasih Lulus, dan Nandhya Marfiana. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret
- Mustikarini, Widya A dan Fitriyasi, Debby. 2012. "Pengaruh Karakteristik pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia". Jurnal. Penerbit: Universitas Indonesia.
- Masdiantini, Putu R dan Erawati, Adi Ni M. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini Audit BPK pada Kinerja Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.14:1150-1182.ISSN:2302-8556.
- Maiyora, Gita. 2015. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah". Jurnal. Jom FEKON vol.2. No.2.
- Masdiantini, Putu R., dan Erawati, Adi N M. 2016. "Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*: 1150-1182. ISSN :2302-8556.
- Marfiana, Nandhya, dan Kurniasih, Lulus. 2013. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Universitas Sebelas Maret*.
- Meilina, Zulia D., Hapsari, Dini W., Dillak, Vaya J. 2016. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Universitas Telkom*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 105. Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang. Nomor 15. Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang. Nomor 23. Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah. Nomor 3.tahun 2007. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah,laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

- Republik Indonesia, Undang-Undang. Nomor 32. Tahun 2014. Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sudarsana, Hafidh S dan Rahardjo, Shiddiq N. 2013. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.E-Jurnal. Diponegoro Jurnal Of Accounting. Volume 2 Nomor 4. Hal.1-13. ISSN (online): 2337-3806.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., dan Brown, A. 2010. “*Mandatory Disclosure Compliance and Lokal Government Characteristics : Evidence From Indonesia Municipalities*. Working Paper Series.
- Sesotyaningtyas, Mirna. 2012. “pengaruh *leverage*, ukuran legislatif, *intergovernmental revenue*, pendapatan pajak daerah terhadap kinerja keuangan pemerintahan daerah”. Accounting analysis journal (Vol.1 no.1). ISSN: 2252-6765.
- Suoth, Novelya, Tinangon, Jantje dan Rondonuwu, sintje. 2016. “Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan”. Jurnal EMBA. Vol.4. No.1 maret 2016. Hal. 613-622. ISSN 2303-1174.
- Yusrianti, Hasni dan Safitri, Rika H. 2015. “Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dilingkungan Pemerintah”. Jurnal Manajemen & bisnis Sriwijaya. Vol.13 No. 4.